



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

Jl. Cempaka Putih Indah 100A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta 10520
Telp. (021) 424 7129 ♦ E-mail: info@driyarkara.ac.id ♦ Website: www.driyarkara.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. 159/STFD/LPPM/01/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Riki Maulana Baruwarso
NIDN : 0308018201
Jabatan : Kepala
Instansi/Perguruan Tinggi : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dr. A. Setyo Wibowo
NIDN : 0325036901
Status : Dosen Tetap
Program Studi : S-1 Ilmu Filsafat
Instansi/Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

telah melakukan kegiatan penelitian pada Semester Gasal T.A. 2023/2024 dengan luaran artikel pada Majalah Populer dalam **Basis**, No. 11-12, Tahun Ke-72, 2023, hlm. 12-31 yang dipublikasikan dengan judul:

“Mewaspadaai Neofeodalisme”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 28 Desember 2023

Kepala LPPM,

Dr. Riki Maulana Baruwarso



Patung karya DUNADI, 2023

Mewaspadaai Neofeodalisme

A. SETYO WIBOWO

Tak mudah membicarakan kebenaran dalam politik. Ruwet. Setiap orang merasa pilihannya yang paling benar, dan untuk itu, mereka siap bertempur membela pujaannya.

Mari kita lihat fakta-fakta politik *copras capres* saat ini. Setelah itu, kita akan memakai lensa pemikiran Aristoteles untuk mempertajam penglihatan bahwa sejatinya kebenaran di politik memang abu-abu. Cara masing-masing orang memutihkan atau menghitamkan yang abu-abu itulah yang menunjukkan karakternya. Manusia bisa digolongkan menjadi manusia ideologis, pragmatis, atau etis berdasarkan cara mereka terlibat dengan isu-isu di dalam *polis* (negara/kota).

Di antara tiga capres

Saya sudah berumur 50-an tahun. Getirnya Orde Baru (1970-1998) dan pahitnya politisasi agama dalam Pilkada DKI 2017 saya alami. Maka, dari tiga capres yang ada, yang buruk semua, bagi saya hanya satu kandidat yang relatif baik untuk dipilih.

Dalam politik tidak ada calon ideal. Semua calon punya sisi buruk. Apa buktinya? Ganjar Pranowo dianggap gubernur yang gagal (karena kasus kemiskinan di Jateng, kasus Wadas dan ibu-ibu Kendeng yang tidak ada tindak lanjut). Saya sepakat bahwa soal-soal itu memang tidak beres. Ia juga terkesan tidak independen karena selalu disebut “petugas partai” oleh PDIP. Anies Baswedan, rekam jejaknya menakutkan karena ia membiarkan politisasi agama (memakai ayat dan mayat) untuk meraih kemenangan Pilkada DKI 2017 melawan



Ahok. Anies sendiri mungkin tidak radikal, tetapi jelas oportunistis yang membuka tangan lebar pada barisan pendukung khilafah. Prabowo? Dia paling menakutkan. Reputasinya sebagai penculik aktivis '98 adalah fakta yang tak bisa dibantah. Betul, ada aktivis '98 yang bergabung dengannya (terakhir, Budiman Sujatmiko). Namun, saya tidak yakin bahwa karakter orang bisa berubah hanya karena beberapa tahun menjadi menteri pertahanan.

Jadi, ketiga calon itu buruk semua. Tidak ada yang ideal. Tetapi, kita harus memilih satu dari tiga yang buruk-buruk itu. Kebijakan kuno menganjurkan supaya kita mencari yang keburukannya lebih kecil daripada yang lainnya. Kita menerapkan prinsip *minus malum* (*lesser evil*, keburukan yang lebih kecil).

Meski begitu, bukankah pilihan saya tetap yang paling benar? Ya dan tidak. *Pertama*, iya, karena setiap orang merasa bahwa pilihannyalah yang paling benar. Saat memilih seseorang, tentu saya beranggapan benar. Namun, pada waktu yang sama, saya juga tahu bahwa saya tidak bisa memaksa orang lain memeluk kebenaran yang saya pilih. Maka, karena sifatnya “keyakinan” personal, kebenaran pilihan politik tidak bisa diklaim bersifat absolut. Oleh karena itu, *kedua*, kita bisa menegaskan bahwa pilihan politik memang tidak ada urusannya dengan kebenaran. Saat memilih seorang politisi, kita sadar bahwa ia manusia. Dan berbicara tentang manusia, kita semua paham bahwa manusia selalu berubah. Padahal, kebenaran bersifat absolut dan universal. Jadi, karena hanya memilih seorang manusia, pilihan politik memang tak ada urusannya dengan kebenaran.

Tetapi, mungkin kita belum benar-benar yakin. Adakah soal benar dan salah dalam politik? Mari kita lihat ruwetnya kebenaran dalam politik berkaca dari ingar bingar mengenai tuduhan dinasti yang disematkan pada Jokowi hari-hari ini.

Dinasti Jokowi?

Senin, 16 Oktober 2023, saat MK membacakan keputusan mengenai gugatan untuk mengubah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, adalah hari yang menarik. Putusan ini menjadi landasan bagi Gibran, putra sulung Jokowi, diusung sebagai calon wakil presiden, sekaligus menjadi momen *Kehre* (pembalikan) bagi orang untuk melihat siapa Jokowi.

Kubu fan Jokowi

Tanggal 16 Oktober 2023, sampai pukul 14.00 WIB, para fan Jokowi (artinya, mereka yang selama 9 tahun terakhir mendukung Jokowi, mereka yang mengharapkan Jokowi berpolitik secara benar, mereka yang berharap bahwa legasi politik Jokowi tidak dinodai oleh politik dinasti) berujar lega, “*Tuh kan, MK menolak gugatan PSI untuk menurunkan ambang batas usia capres dan cawapres.*” Mereka lega karena sirnalah kekhawatiran bahwa Jokowi ingin melanggengkan kekuasaan lewat anak-anaknya.

Namun, MK belum selesai membacakan keputusannya. Tak lama kemudian, pukul 16.00, ternyata MK mengabulkan gugatan lainnya², sehingga meski belum berusia 40 tahun “asal pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah” seseorang bisa mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres. Pada pukul 16.00 inilah para fan Jokowi lemas. Mereka tak menduga bahwa MK (yang sejak seminggu sebelumnya dipelesetkan menjadi “Mahkamah Keluarga”, karena ketua MK adalah adik ipar Jokowi) ternyata benar-benar memberi karpet merah kepada Gibran untuk melenggang menjadi

“

Saat memilih seorang politisi, kita sadar bahwa ia manusia. Dan berbicara tentang manusia, kita semua paham bahwa manusia selalu berubah. Padahal, kebenaran bersifat absolut dan universal. Jadi, karena hanya memilih seorang manusia, pilihan politik memang tak ada urusannya dengan kebenaran.

cawapres. Mereka tidak menduga MK berani melakukan itu. Apalagi, beberapa waktu sebelumnya, dua mantan Ketua MK, Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie, sudah mengingatkan bahwa MK tidak punya kewenangan mengubah UU Pemilu No. 7/2017 tentang batas umur capres/cawapres. Mereka yang berharap Jokowi akan *soft-landing* di akhir kekuasaannya, sekarang kehabisan akal: *kok* Jokowi mengobok-obok Mahkamah Konstitusi demi anaknya? Bukankah ini artinya Jokowi memperlemah institusi penting seperti MK (benteng pertahanan terakhir sengketa pilpres)? Bukankah ini gawat sekali? Kalau MK dianggap partisan, bagaimana nanti bila ada sengketa hasil pilpres? Sampai tanggal 20 Oktober 2023, rumor sangat santer bahwa Prabowo menggadang-gadang Gibran menjadi cawapresnya. Semua menjadi klir ketika tanggal 25 Oktober 2023, Prabowo-Gibran resmi menjadi capres dan cawapres Koalisi Indonesia Maju dan mendaftar ke KPU.

Dari kalangan fan Jokowi ada yang mulai bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, dan mulai mengambil jarak dari Jokowi. Namun, banyak pula dari kalangan ini yang tetap berprasangka baik pada Jokowi: apa pun yang dilakukan Jokowi pasti demi kebaikan bangsa, hanya kita saja yang tak paham dengan langkah *play maker* jagoan ini.

Kubu pembenci Jokowi

Sebaliknya, kubu pembenci-Jokowi (kadang dijuluki “salawi” karena mereka berprinsip semua “*salahnya Jokowi*”) mengalami kebalikannya. Pukul 14.00 mereka terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa MK menolak mengabulkan gugatan penurunan usia capres/cawapres.

Tetapi, begitu pukul 16.00, mereka bersorak gembira, “*Tuh kan, bener* dugaan kita bahwa Jokowi memang *kayak gitu*.” Mereka bergembira ria karena apa yang mereka tuduhkan selama ini kepada Jokowi (bahwa dia antek *asing* dan *aseng*; bahwa dia haus kekuasaan, melegalkan segala cara untuk berkuasa), benar adanya. Dugaan mereka terkonfirmasi. Jokowi mengkhianati Reformasi, ia terlibat kolusi dan nepotisme.

Dari kalangan pembenci ini, tak ada yang kemudian beralih menjadi fan Jokowi. Kalau dulu mereka hanya benci, sekarang menjadi benci *banget* karena Gibran dimasuk-masukkan ke Prabowo.

Pembelahan baru?

Perseteteruan kubu *cebong vs kampret* (Pilpres 2014 dan 2019) sekarang bermetamorfosis menjadi perseteruan antara “pro-Jokowi vs anti-Jokowi”. WA grup dan medsos berisi bantah-bantahan kedua kelompok ini.

Di kubu pro-Jokowi kita temukan: mantan *kadrin* (Prabowo cs) yang mengharapkan dukungan Jokowi dan kehadiran Gibran menambah lumbung suara dari para mantan *cebong* (seperti Budiman Sujatmiko dan Projo Budi Arie), serta *cebong-cebong* yang tegak lurus pada Jokowi. Sementara, di kubu anti-Jokowi ada: *kadrin* (yang beralih dari Prabowo ke Anies) serta mantan *cebong* yang mengambil jarak dari Jokowi (lalu ke Ganjar atau Anies).

Jokowi yang katanya hendak mengajak orang melupakan pembelahan *cebong-kampret/kadrin* di masyarakat (residu Pilpres 2014 dan 2019), saat ini menjadi faktor pembelahan itu sendiri. Benar bahwa Jokowi berhasil merangkul *kadrin* untuk berada di barisan pendukungnya (kelompok Prabowo cs); namun Jokowi gagal merangkul *die hard kadrin* (pembela Anies). Tetapi, dari kalangan *cebong*, para pendukung fanatiknya terpecah. Beberapa *cebong* percaya pada Jokowi dan mendukung Prabowo. Tetapi, isu politik dinasti membuat *cebong* lainnya patah hati. Seperti Didi Kempot, mereka merasa dikecewakan: “*tak tandur pari, jebul tukulé malah suket teki*, saya tanam padi, *kok* tumbuhnya rumput teki (hama)”. Mantan *cebong* ini berbalik melawan Jokowi.

Dalam ingar bingar politik seperti itu kita pusing meraba-raba di mana Sang Kebenaran berada. Apakah kebenaran ada di pihak pro-Jokowi atau anti-Jokowi?

Meski pusing, dalam situasi seperti itu, tiap posisi mengeklaim kebenarannya sendiri-sendiri. Kelompok pro-Jokowi senang dengan manuver-manuver ini, karena dengan *cawe-cawe* Jokowi yang tingkat popularitasnya begitu tinggi, maka kemenangan pilpres sudah di depan mata. Kubu Prabowo (didukung mantan *cebong* Projo Budi Arie) optimis bahwa kebenaran ada di pihak mereka. Dengan berbagai alasan, kelompok ini tetap percaya sepenuhnya kepada Jokowi. Ada yang senang bahwa strategi “mengambil suara dari fan Jokowi” menambah pundi-pundi pemilih Prabowo. Di kalangan ini ada yang percaya segenap jiwa dan raga kepada Jokowi sebagai sang *play maker*! Apa pun yang dibuat Jokowi, pasti benar. Mereka tak segan merundung PDIP. Kata mereka, PDIP adalah partai yang arogan dan tidak tahu terima kasih kepada Jokowi yang dalam dua kali Pilpres

telah memenangkan PDIP. Kata mereka: “Tanpa Jokowi, *emang* PDIP itu apa?” Di mata para pendukung fanatik ini, PDIP tak berbeda dengan *kadrun*.

Di barisan pro-Jokowi, untuk membela kebenarannya sendiri, muncul “tafsir” atas Jokowi yang rumit. Katanya, Jokowi tidak sedang membangun dinasti, Jokowi tidak ada masalah dengan Megawati, tetapi Jokowi sedang menapaki “jalan sulit” demi bangsa dan negara. Argumennya seperti ini: keinginan Jokowi adalah menyatukan para politisi Indonesia, menghindari Indonesia dari perpecahan. Ia merangkul Prabowo, dan melihat bahwa jalan satu-satunya untuk mengalahkan para pengasong politik identitas adalah menggabungkan Prabowo dengan Ganjar. Begitu Surya Paloh mengusung Anies Baswedan (ikon Pilkada DKI 2017 yang memakai agama untuk meraih kekuasaan politik), maka Jokowi yakin bahwa hanya pasangan Prabowo–Ganjar yang bisa mengalahkannya. Maka, pada satu hari Jokowi mendukung Ganjar, dan pada hari lain ia mendukung Prabowo. Bahkan, Jokowi berusaha mempertemukan mereka berdua di pematang sawah. Namun, ini tidak mudah. Mengapa? Karena Prabowo jelas sudah menjadi capres, dan Ganjar waktu itu juga nyaring akan diusung sebagai capres oleh PDIP.

Saat pengumuman bahwa capres PDIP adalah Ganjar, dan Jokowi sama sekali tidak diberi tahu, padahal dia sudah tiba di Solo, itu adalah momen pertama Jokowi kecewa. Lalu, mulailah Jokowi mereaksi PDIP. Ia mempertontonkan bahwa Projo dekat dengan Prabowo, lalu Kaesang tiba-tiba menjadi ketua PSI. Itu sinyal bahwa Jokowi “protes” kepada PDIP. Jokowi ingin supaya PDIP menurunkan egonya dan kembali menyatukan Prabowo dan Ganjar. Tapi, tidak ada respons dari PDIP. Akhirnya, Jokowi mengeluarkan kartu terakhir: Gibran menjadi cawapres Prabowo. Katanya, Gibran hanya bisa dihentikan kalau Ganjar bersedia menjadi wakilnya Prabowo. Dan waktu itu ada kesempatan panjang untuk merenungkan hal ini, karena proses sidang MK diundur-undur terus. Namun, apa daya, PDIP malah mencalonkan cawapres Mahfud MD ketika Jokowi sedang berada di luar negeri (kunjungan ke Cina). Di mata Jokowi, pintu sudah tertutup. Itu makanya, yang paling bisa merepresentasikan kesatuan hanyalah Prabowo–Gibran. Inilah “jalan sulit” Jokowi.

Ada lagi analisis super rumit yang mengisahkan bahwa Jokowi sedang berusaha menyelamatkan Indonesia dari kaum radikal, kaki tangan neoliberal. Atas dasar analisis geopolitik bahwa AS menciptakan Al

Qaeda dan ISIS untuk memporandakan sebuah negara (Libya, Irak, Suriah), maka “langkah catur” yang dibuat Jokowi adalah mencegah tangan-tangan neoliberal global memecah belah bangsa. Katanya, ada dokumen bocoran bahwa AS menyiapkan *color revolution* untuk mendikte Indonesia agar presiden terpilih 2024 nanti mengikuti politik AS untuk memerangi Cina. Untuk mencegah itu, Jokowi harus mengorbankan dirinya dan Gibran, putranya. Bagaimana argumennya? Pertama, sejak Pilpres 2014 dan 2019 Jokowi memiliki musuh utama: kaum radikal. Kedua, permusuhan *cebong vs kampret* berlarut-larut sampai sekarang. Jokowi sadar bahwa ia harus menyelesaikan problem parah ini demi Indonesia Emas pada tahun 2045 karena di belakang kaum radikal sesungguhnya adalah Amerika Serikat. Ketiga, demi maksud besar itu, maka Jokowi harus *cawe-cawe* dalam Pilpres, ia rela mengorbankan reputasi dirinya sendiri, termasuk “mengorbankan” Gibran, anaknya. Mengapa mengorbankan diri? Ya karena dengan *cawe-cawe* ini Jokowi sebenarnya melakukan *political suicide*. Dia sudah bekerja bagus selama 9 tahun, lalu setahun terakhir mengorbankan diri demi masa depan Indonesia. Bahkan, ia juga rela mengorbankan anaknya, Gibran. Jokowi paham bahwa jika Gibran kalah di Pilpres, maka karier politiknya tamat. Tapi, risiko ini diambil oleh Jokowi dengan rela hati. Dengan Gibran masuk di belakang Prabowo, maka kaum radikal akan bisa dikendalikan. Tangan-tangan neoliberal di belakang Prabowo akan bisa ditahan. Jangan lupa, Jokowi juga mendukung Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud. Jokowi juga memasukkan Cak Imin di belakang Anies. Dengan begitu, Pilpres 2024 adalah “*all Jokowi’s men*”. Dengan “langkah kuda” ini, ancaman politik identitas bisa diredam, campur tangan neoliberal asing bisa diantisipasi.

Analisis seliar apa pun tentu sah. Tapi, jangan naif. Politik Indonesia itu *serem*. Pertama, benarkah isu politik identitas hilang? Kalau hampir 20 tahun kaum radikal membangun jaringan, semudah itukah mereka hilang di Indonesia? Bahwa isu politik identitas sekarang kurang terdengar dibandingkan isu politik dinasti, apa artinya ancaman hilang? Dengan melihat rekam jejak Prabowo pada 2014 dan 2019, jangan-jangan tenggelamnya politik identitas ini hanya taktik. Bila dibutuhkan, para pengasong khilafah pasti akan dinaikkan lagi. Kedua, kalau melongok ke sejarah, Sukarno itu dulu kurang hebat apa? Dia jauh lebih hebat daripada Jokowi. Tapi, begitu dia jatuh, perlakuan Suharto kepadanya mengerikan!

Bahkan, keturunannya pun dibuat menderita puluhan tahun. Jangan lupa, begitu seseorang menjadi presiden, ia punya kekuasaan luar biasa. Katakan Prabowo terpilih menjadi presiden, apa jaminannya bahwa dia tunduk pada Jokowi? Tidak ada jaminan apa pun. Prabowo seorang tentara. Dua kali kalah membuatnya mengubah taktik. Ia menjadi sabar, merunduk, seperti *sniper*. Begitu momen datang, *dor*. Itulah pola pikir tentara. Lagipula, kebiasaan di Indonesia, begitu seseorang berkuasa, ia akan men-*delete* jejak pendahulunya guna membangun kepentingannya sendiri. Bukankah ada Gibran? *Lha*, presidennya siapa? Yang berkuasa sepenuhnya di republik ini adalah presiden! Tapi *kan* ada Jokowi? Jokowi itu siapa? Begitu lengser, tanpa partai, tanpa mesin di belakangnya, tanpa *bohir*, Jokowi bukan siapa-siapa.

Namun, dari kalangan pro-Jokowi ini ada pula yang realistis dan mengatakan: *Ah, soal Gibran ini, mah, biasa saja*. Lagipula, apa salahnya Jokowi *cawe-cawe* guna memastikan bahwa proyek-proyeknya (hilirisasi, kereta cepat, dan IKN) nanti berlanjut? Politik tiga kaki yang dijalankan Jokowi (menanam Gibran di belakang Prabowo, mendukung Ganjar, serta memasukkan Cak Imin di kubu Anies) adalah demi keberlangsungan pembangunan.

“

Kalau kebiasaan tidak *fair* ini dilakukan oleh seorang yang memiliki kuasa penuh atas TNI, Polri, dan birokrasi pemerintahan, bukankah ini mengingatkan kita akan cara-cara Orde Baru memenangkan pemilihan umum? Dengan mencederai aturan main demokrasi, bukankah demokrasi sendiri yang sedang dimatisurikan?

Satu, normal bahwa insting penguasa adalah melestarikan kekuasaannya. Bila secara riil tak bisa (karena dibatasi UUD), maka perlu mengusahakan cara lain, termasuk lewat anaknya, untuk tetap berkuasa. Dua, sejauh manuver-manuver menekuk lembaga demokrasi (MK), memobilisasi ASN, Polri, dan TNI untuk memenangkan Gibran bukan kata akhir, ya kita terima saja. Mengapa? Karena demokrasi ujungnya adalah *pilihan oleh rakyat*. Mau semasif dan sesistematis apa pun upaya Jokowi memenangkan anaknya, *toh*, semua terserah pilihan rakyat. Ia bukan diktator yang bisa memaksa agar rakyat memilih Prabowo-Gibran. Tentu kita kecewa dengan cara main yang tidak netral dan tidak *fair*. Tapi, mau bilang apa? Itulah politik.

Betul, itu politik. Masalahnya, soal “cara main” ini tidak enteng-entengan. Kalau kebiasaan tidak *fair* ini dilakukan oleh seorang yang memiliki kuasa penuh atas TNI, Polri, dan birokrasi pemerintahan, bukankah ini mengingatkan kita akan cara-cara Orde Baru memenangkan pemilihan umum? Dengan mencederai aturan main demokrasi, bukankah demokrasi sendiri yang sedang dimatisurikan?

Sementara kelompok anti-Jokowi sangat bergembira karena merasa kebenarannya makin terkonfirmasi. Kelompok ini, utamanya dari *kadrun*, sudah sejak lama memegang kebenaran bahwa Jokowi adalah penipu. Sudah sejak lama mereka ingin memakzulkan Jokowi karena melihat bahwa presiden ini penuh khianat dan despotik.

Namun, tidak seenteng itu juga memakzulkan seorang presiden. Butuh proses panjang. Selama kondisi ekonomi baik-baik saja (faktor yang membuat Soekarno dan Soeharto jatuh) dan tidak ada perang saudara (dalam kasus kejatuhan Gus Dur), sangat sulit untuk menurunkan seorang presiden.

Di kalangan anti-Jokowi ini, ada kelompok yang dulunya *cebong* tetapi sekarang galau dan mulai sadar bahwa hasrat kuasa Jokowi dan keinginan melanggengkan dinasti pelan-pelan menggerogoti legasi Jokowi sendiri. Kubu ini mulai mengambil jarak. Mereka percaya bahwa Jokowi bekerja 9 tahun dengan baik dan jujur. Mereka percaya bahwa Jokowi adalah presiden yang bagus, yang tidak korupsi, yang bekerja keras demi bangsa ini. Namun, kelompok ini galau ketika MK diacak-acak guna memuluskan Gibran menjadi cawapres. Benarkah Jokowi ingin supaya proyek pembangunannya diteruskan? Kalau iya, dan itu sah, mengapa harus Gibran? Bukankah Ganjar Pranowo lebih paten? Mengapa



Foto : Francisca Purnawijayanti |
gelaran musik NDX ketoprak, 26 Juli 2023, Pendopo Tulungo

malah menunjuk anaknya sendiri? Bukankah ini persaingan yang tidak *fair*? Sekali lagi, soalnya bukan bahwa Gibran anak muda. Kelompok ini tidak anti anak muda. Jangan salah paham. Soalnya bukan boleh tidak bolehnya anak muda maju berkontestasi. Orang-orang ini tidak mempermasalahkan usia Gibran. Mereka hanya keberatan dengan “cara” meloloskan Gibran yang tidak beretika. Bagaimana mungkin anak muda kemarin sore bisa mengalahkan kandidat seperti Airlangga Hartarto, Ridwan Kamil, Erick Thohir, atau Khofifah untuk menjadi cawapres? Jelas kelihatan bahwa tidak

ada kontestasi yang wajar. Apalagi, ketua MK adalah adik ipar Jokowi sendiri. Semua terlalu jelas, *cetha wela wela* kata orang Jawa, bahwa Jokowi di balik itu semua.

Goenawan Mohamad dalam *talk show* dengan Rosi di *Kompas TV* (2 November 2023) menunjukkan kekecewaannya pada apa yang terjadi selama dua minggu akhir Oktober 2023. Mas Goen kecewa bahwa MK dihancurkan kredibilitasnya. “Kemarahan saya adalah soal Gibran, anak presiden, naik ke atas. Bukan karena Gibrannya. Bukan karena umurnya. Tetapi karena tidak *fair*. Dan ketika ini merusak sistem kehakiman



“

Ini bahaya, karena kalau hukum adalah hukum dari yang berkuasa, dan bukan wujud keadilan, maka masyarakat bisa kacau.

di tingkat Mahkamah Konstitusi, ini berbahaya sekali. Karena ketika nanti kita membutuhkan Mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Dan ini berbahaya sekali bagi suatu konflik yang tidak mustahil akan terjadi.” Pada tanggal 17 Oktober, sehari setelah putusan MK, Mas Goen mencuit di *X* (dulu *Twitter*) bahwa “kekuasaan membuat si penguasa bodoh dan takabur (hakim Konstitusi dan mungkin termasuk Bapak Jokowi). Bodoh dan takabur karena mengira rasa keadilan masyarakat bisa dilecehkan dalam sebuah sandiwara murahan”. Ini bahaya, karena kalau hukum

adalah hukum dari yang berkuasa, dan bukan wujud keadilan, maka masyarakat bisa kacau. Bagi banyak orang seperti Mas Goen, kebenaran menjadi rumit. Apa yang dilakukan Jokowi ini salah, tetapi bagaimana mungkin orang yang telah 9 tahun bekerja baik bisa melakukan kesalahan seperti ini?

Mundur ke belakang, pada hari Rabu, 25 Oktober 2023, Adian Napitupulu mencoba menjelaskan latar belakang permasalahan Gibran di MK. Menurutnya, PDIP sudah terlalu banyak memberi kebaikan kepada Jokowi (dua kali rekomendasi menjadi wali kota, sekali rekomendasi

menjadi gubernur, dua kali rekomendasi menjadi presiden, sekali rekomendasi untuk menantunya menjadi Wali Kota Medan dan satu kali rekomendasi untuk anaknya menjadi Wali Kota Solo). Jadi, menurut Adian, PDIP sudah sangat banyak memberi. Namun, saat Jokowi menghendaki 3 periode, permintaan ini ditolak PDIP³ karena bertentangan dengan konstitusi.

Omongan Adian ini segera dibantah oleh Puan Maharani⁴. Setelah beberapa hari terjadi polemik soal apakah Jokowi pernah meminta 3 periode atau tidak, akhirnya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, memperjelas bahwa permintaan Jokowi tentang 3 periode ini memang ada, dan info itu ia dapat dari seorang menteri⁵.

Di mana kebenaran?

Dengan ingar bingar perseteruan kubu pro dan anti-Jokowi ini, kembali ke pertanyaan awal: di mana kebenaran ditemukan? Kebenaran di politik memang ruwet. Sulit sekali menerapkan teori kebenaran faktual (teori korespondensi) di sini. Semua cenderung memakai teori kebenaran koherensi. Masing-masing merangkai logikanya sendiri-sendiri, dicocok-cocokkan sendiri dengan hal-hal yang tak jelas faktual atau fiktif⁶.

Kalau kita hendak menerapkan teori kebenaran faktual (korespondensi) berkenaan dengan putusan MK, maka kita harus mengecek ke Jokowi. Saat diminta berkomentar mengenai putusan MK, Jokowi menjawab secara normatif: sebagai kepala eksekutif ia tidak campur tangan dengan apa yang terjadi di dalam ruang yudikatif (MK)⁷.

Memakai kriteria kebenaran faktual (korespondensi), tentu saja apa yang dikatakan Jokowi benar adanya. Sejauh ini memang tidak ada bukti Jokowi memanggil hakim MK untuk merancang perubahan batas usia di UU Pemilu. Secara faktual, yang kita tahu, Jokowi tidak pernah campur tangan secara langsung.

Masalahnya, dalam soal kebenaran faktual, supaya kebenaran ini kokoh, orang tidak bisa percaya pada satu fakta. Butuh fakta-fakta pendukung lainnya. Di sini soalnya menjadi pelik. Kita tahu ada fakta-fakta lain: Ketua MK (Anwar Usman) adalah adik ipar Jokowi. Bukankah sangat mungkin untuk memaksakan pengaruh Jokowi lewat Ketua MK? Banyak kesaksian bahwa Jokowi memakai tangan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, untuk mengatur banyak hal. Jadi, ia tak perlu turun tangan sendiri untuk berkomunikasi dengan Ketua MK.

Di satu sisi, memang tidak ada bukti eksplisit bahwa Jokowi memengaruhi Ketua MK. Di sisi lain, bukti-bukti lain yang mengarah ke keterlibatan Jokowi juga ada.

Lebih ekstrem lagi, beberapa orang melihat gelagat komunikasi Jokowi memang sengaja mengaburkan fakta. Artinya, kalau Jokowi mengatakan A, berarti kenyataannya adalah non-A. Kalau Jokowi bilang tidak *cawe-cawe*, artinya ia mendesain segalanya karena ia memiliki semua info tentang arah dukungan parpol. Jadi, kalau Jokowi bilang ia tidak campur tangan di MK, artinya ia sudah menyiapkan jauh-jauh hari dengan menunjuk iparnya sebagai ketua MK. Kalau Jokowi bilang *aja grusa-grusu*, artinya Jokowi selalu *grusa-grusu* (saat jadi Gubernur DKI belum selesai mandatnya, langsung nyapres; saat membuat infrastruktur langsung *ngebut* semuanya – termasuk Kereta Cepat *Whoosh* dan IKN yang hawanya *grusa-grusu* sekali, dan saat anak-anaknya masih muda, sudah langsung masuk politik. Belum kelar pro kontra Gibran menjadi cawapres, Kaesang, Ketum PSI, katanya akan *nyalon* jadi Gubernur DKI⁸). Kalau Jokowi bilang aparat negara harus netral, artinya dia sedang memobilisasi aparat untuk memenangkan anaknya (polisi ikut memasang baliho Gibran, Satpol PP mencopoti baliho Ganjar, tentara mulai nongol di ranah sipil lagi). Jadi, teori kebenaran korespondensi memang tidak berlaku untuk menilai Jokowi, karena, mengutip biografi Jokowi tulisan Ben Bland: Jokowi adalah kontradiksi.

Lewat ciri pokok kontradiksi ini, orang kemudian membangun teori kebenaran koherensi. Artinya, sesuatu benar bila koheren. Pernyataan Jokowi yang “tidak mencampuri MK” merupakan bukti bahwa Jokowi *justru* mencampuri. Meski bertentangan secara faktual (dalam arti, ini tidak benar), namun omongan Jokowi ini koheren dengan cara komunikasi dia selama ini.

Adian Napitupulu, dalam sebuah *talk show* dengan Najwa Shihab, yang saya dengarkan pada 3 November 2023, menggambarkan dengan bagus situasi ini: “Dulu, Jokowi bohong mungkin masih kita anggap kebenaran. Tapi sekarang, dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Kita ini sedang bingung, kita *kan* sebenarnya sedang kehilangan nilai. Tahu *nggak*, bahwa ada pergeseran nilai yang menakutkan bagi *gua*, tentang salah benar, baik buruk. Mungkin betul yang dibilang Bang Fahri (Hamzah) bahwa politik selalu punya dua muka: ya di sini bilang netral, tapi lalu baliho (di Bali) *diamblin*, ya di sini harus menghormati konstitusi, tapi lalu UU diubah di Mahkamah Konstitusi. Mungkin yang

lu bilang itu realita politik, walau pun *gue* menganggap, dalam konteks politik yang lebih baik, itu salah, dan tidak bisa menjadi benar karena itu adalah realita politik. Artinya, walaupun itu realita, kita tidak boleh tunduk. Kita ada di sini bukan untuk tunduk pada realita tetapi mengubah realita, membuat politik makin beradab, bermoral tidak hilang nilai-nilai kesetiaan, kejujuran yang kita perjuangkan sejak 25 tahun lalu. Bukan begitu Bang?”

Kembali ke pertanyaan: adakah kebenaran dalam politik? Politik memang ruwet, meski seharusnya tidak begitu. Jadi, bagaimana? Untuk mencari secercah inspirasi, menurut saya, pemikiran Aristoteles bisa membantu kita meletakkan problem kebenaran di ranah politik ini dengan *clear*.

Tiga ranah ilmu menurut Aristoteles

Pemikiran Aristoteles (384–322 SM) menjangkau banyak hal. Ia membahas mengenai logika, relasi jiwa-badan, gerakan dan perubahan di alam semesta, Metafisika, Retorika, Etika, dan Politik.

Bagaimana memahami kajian Aristoteles mengenai politik, adakah kebenaran dalam politik? Untuk menjawab soal itu, mengikuti uraian Aristoteles sendiri, kita perlu meletakkan dulu di mana lingkup pembahasan politik. Dalam bukunya *Metafisika*, Aristoteles memilah-milah tiga ranah ilmu yang berbeda.

Bersangkutan dengan benda-benda hasil produksi (*poieton*), prinsip gerakan (entah itu akal budi, atau seni keterampilan, atau sejenis potensi) ditemukan dalam diri prodaktor; dan bersangkutan dengan tindakan yang dilakukan (*praktikon*), kehendak ada di dalam diri agen (pelaku tindakan) – karena tindakan yang dilakukan dan tindakan yang dikehendaki adalah sama. Demikianlah, dalam segala kegiatan intelektual sifatnya atau *praxis*, atau produktif, atau spekulatif (*hoste ei pasa dianoia he praktike he poietike he theoretike*), dan fisika adalah ilmu spekulatif (*Meta-physics Epsilon 1025b 24–30*).

Aristoteles membedakan tiga ranah ilmu. Pertama, ranah *theoria* (dari kata kerja *theorein*, artinya kontemplasi, spekulasi) yang merujuk pada ilmu-ilmu teoretis seperti fisika, matematika, dan metafisika/teologia. Kedua, ranah *praxis* (dari kata kerja *prattein/ action*) merujuk pada ilmu-ilmu yang berkenaan dengan tindakan manusia, misalnya etika dan politik. Serta, ketiga, *poiesis* (dari kata kerja *poiein*, artinya,

mengerjakan, bekerja teknis memproduksi sesuatu) yang merujuk pada ilmu arsitektur, ilmu membuat gerabah, ilmu kedokteran, dan semacamnya.

Ranah ilmu teknis/*Poiesis*.

Tekne atau pengetahuan *poiesis* (yang dalam bahasa Latin menjadi *Ars*, dan dalam bahasa Inggris menjadi *Art*) adalah sebuah pengetahuan yang orientasinya memproduksi sesuatu (sebuah *ergon*). Berbeda dengan tanaman atau alam yang prinsipnya bekerja dari dalam dirinya sendiri (misalnya, pohon bertumbuh dari kodratnya sendiri), maka prinsip yang membuat orang teknis mampu membuat tanaman dari plastik ditemukan di dalam diri agen (si pembuat). Seorang teknikus memiliki prinsip di dalam dirinya, sebuah disposisi (*hexis*) yang bersifat rasional hasil dari pengalaman atau pembelajaran sebelumnya. Prinsip ini mengizinkan si teknikus memahami “sebab-sebab suatu hal”, sehingga mampu memproduksi sesuatu.

Meski seorang teknikus memiliki prinsip-prinsip seperti di atas, *toh*, hasil produksi yang ia telurkan belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Hasil produksi ini tunduk pada hukum perubahan. Maka, pengetahuan teknis (atau *poesis*) bersifat kontingensi. Dalam kegiatan teknis, sekali *telos* (tujuan produksi) terlaksana, maka aktivitas produksi berhenti. *Telos* yang semula ada di agen, kini berpindah ke produk. Aktivitas produksi secara kodrati adalah aktivitas yang tidak sempurna karena hasilnya di luar agen dan tunduk pada perubahan.

Hasil produksi teknis biasanya berkenaan dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk kepentingan sehari-hari. Kriteria utama untuk produksi teknis adalah kegunaan dan kesenangan.

Secara kronologis dan historis, pengetahuan teknis adalah pengetahuan pertama yang dimiliki manusia. Pengetahuan ini mengizinkan manusia memiliki basis material dan ekonomis sehingga bisa meningkat lebih tinggi mencari pengetahuan-pengetahuan yang tidak mesti berguna secara langsung atau pengetahuan-pengetahuan lain yang memiliki tingkat kegunaan berbeda (bdk. Alfred Gomez-Muller, *Chemins D'Aristote*, Paris: Éditions du Félin, 1991, hlm. 28–29).

Kita ambil contoh ilmu perbengkelan. Dalam ranah ilmu *teknis*, ukuran keberhasilan pekerjaan ditemukan pada hasilnya, bukan pada teori yang dipakai atau integritas moral tukang bengkelnya. Hasil kerja teknis berada “di luar” tukangnyanya, bisa dipisahkan dari tu-

kangnya, sehingga hasil ini, atau *telos* ini, menjadi tolok ukur paling penting.

Saat sepeda motor kita rusak, kita minta kepada tukang di bengkel supaya motor bisa jalan lagi. Rasanya tidak relevan untuk menanyakan agama si tukang bengkel, atau integritas moral pabrik pembuat ban yang akan dipakai.

Saat kita mencari nasi goreng, apakah perlu kita menanyai dulu karakter dari tukangnyanya? Bukankah yang paling penting adalah nasi gorengnya enak. Tak peduli si tukang menjelaskan bahwa resep nasinya adalah hasil *searching* di *Google* atau hasil *copy paste* resep sebuah resto bintang lima *Michelin*, kalau nasinya tidak enak, maka semua penjelasan teoretis atau moralis tidak akan diperhitungkan.

Di ranah ilmu teknis ini, kriteria utama adalah kegunaan, sedangkan soal kebenaran teoretis dan integritas moral tidak dianggap penting.

Di level *teknis* orang tidak peduli dengan si A itu apa atau seperti apa. Yang penting, hasil kerja dia bagus. Titik. Perkara metode kerjanya membuat orang *senewen*, perkara kata-katanya keras, perkara ia ras tertentu, atau apa pun, yang bisa diukur objektif adalah hasilnya. Soal kebenaran teori atau integritas moral tidak menjadi faktor penentu.

Orang yang cenderung menggunakan cara berpikir *teknis* dalam menilai segala bidang kehidupan, biasanya dilabeli sebagai orang *pragmatis*.

Sikap pragmatis

Pilpres? Sudahlah, tidak usah pusing. Kalau hasil kerjanya bagus, pilih dia. Soal cara dia bekerja bagaimana, tidak penting. Apakah untuk mendapatkan hasil itu harus menggunakan model Putin yang berkali-kali mengotak-atik konstitusi supaya dia bisa berkuasa terus, atau model Cina yang memakai model partai tunggal, atau model Jokowi yang mengondisikan MK, tak usah dipermasalahkan. Prinsipnya: tak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Orang-orang seperti ini disebut pragmatis karena tidak peduli pada soal cara – etis atau tidak etis – ataupun soal kebenaran teori.

Kriteria utama di sini kegunaan dan kesenangan. Ranah hubungan antara manusia – misalnya memilih capres – ditundukkan pada kegunaan. Selama berguna, dipilih, kalau tidak, dibuang. Pertama, sikap ini *rada-rada* tidak bertanggung jawab. Memilih presiden jangan disamakan dengan memilih bengkel. Kita bisa gonta-



“
Memilih seorang presiden tidak bisa enteng-entengan. Anda harus melihat rekam jejak, berpikir keras menggunakan rasio sebelum menjatuhkan pilihan. Kalau Anda mengandalkan kultus pada seseorang (dengan jargon tegak lurus pada Jokowi), apakah Anda yakin bahwa produk pilihan Anda akan lurus seperti Jokowi? Wallahuallah.



ganti bengkel tiap saat, tetapi presiden terpilih akan berkuasa 5 tahun. Kedua, kita juga mesti ingat bahwa produk hasil kerja teknis berada di luar kendali si produsen. Anda memilih presiden tentu dengan alasan-alasan Anda sendiri sehingga si A dianggap berguna. Apakah alasan Anda itu akan sama dengan produk yang dipilih? Produk di luar kendali si pemilih! Jadi, siapkah Anda mendapatkan produk yang akan *ngawur-ngawuran* sebagai presiden nanti? Memilih seorang presiden tidak bisa enteng-entengan. Anda harus melihat rekam jejak, berpikir keras menggunakan rasio sebelum menjatuhkan pilihan. Kalau Anda mengandalkan kultus pada seseorang (dengan jargon tegak lurus pada Jokowi), apakah Anda yakin bahwa produk pilihan Anda akan lurus seperti Jokowi? Wallahualam.

Ranah ilmu teoretis

Kebalikan dari ilmu teknis, ilmu teoretis (*théoretike*) adalah ilmu yang *tidak memproduksi apa-apa*. Apakah berarti ilmu teoretis tidak penting? Menurut Aristoteles (*Metafisika Epsilon* 1 1025a), meski tidak berguna, ilmu ini penting. Ilmu teoretis berkenaan dengan *theoreia*, aktivitas kontemplasi, sebuah pencarian pengetahuan tanpa kepentingan apa-apa, tidak berambisi memproduksi apa-apa, namun justru membahagiakan.

Di buku *Metafisika Lambda* 7, 1072b 24, *theoreia* disebut memberi keadaan yang paling menyenangkan dan paling sempurna, *theoreia* adalah *actus* yang dimiliki oleh Tuhan. Bagi Aristoteles, Tuhan – yang adalah motor imobil – adalah *actus* absolut yang mengontemplasikan dirinya sendiri. Bagi manusia, Tuhan adalah objek ultima bagi kontemplasinya, meski bukan satu-satunya, karena manusia juga mengontemplasikan tubuh-tubuh ilahiah yaitu planet-planet. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan seolah-olah Aristoteles seorang mistikus. Aristoteles berbicara di ranah manusia. Ia mengajak manusia melatih diri supaya “apa yang terbaik di dalam diri kita” (1177b31) mendekat pada yang ilahiah, supaya kita menjadi “makhluk-makhluk yang disayangi keilahian” (9, 1179a24) di muka bumi ini, bukan di surga nanti (Pierre Pellegrin, *Dictionnaire Aristote*, Paris: Ellipses, 2007, hlm. 63).

Di awal buku *Metafisika Alpha* 1980 a 22–28, Aristoteles juga mengatakan bahwa manusia secara alamiah berciri teoretikus. Manusia menyukai *connaissance pure* (pengetahuan yang murni, pengetahuan demi pengetahuan itu sendiri, dan bukan demi aplikasinya). Itulah kodrat manusia. Itulah kebijaksanaan (*sophia*,

wisdom), itulah kenikmatan paling tinggi setaraf dengan Tuhan.

Prinsip yang menggerakkan manusia untuk ber-*theoria* adalah sesuatu yang ada di luar manusia, misalnya kosmos, bintang-bintang di langit. Rasa takjub atas sesuatu di luar dirinya membuat manusia bertanya, berpikir, mencari, dan berfilsafat. Spekulasi teoretis ini hasilnya ditemukan dalam kepala si filsuf itu sendiri. Oleh karena itu, berguna atau tidaknya kontemplasi filsafat ditentukan oleh si filsuf sendiri. Aristoteles percaya bahwa kegiatan teoretis ini, meski tidak memiliki kegunaan langsung, memberikan kenikmatan dan kepuasan, karena dalam tindakan tanpa guna inilah justru ditunjukkan harkat dan martabat tertinggi manusia: makhluk yang bebas-merdeka (*Metaphysics Alpha* 1 982b 12-28).

Kaum prasokratik, seperti Thales atau imam-imam Mesir, suka berspekulasi tentang langit dan peredaran bintang-bintang *demi kenikmatan mengetahui itu sendiri*. Pengetahuan di level ini adalah tanda “kemerdekaan”. Di Yunani Kuno, para budak harus belajar ilmu memasak, ilmu kedokteran, dan ragam ilmu teknis untuk kesintasan mereka. Para warga negara yang merdeka menggunakan waktu luangnya untuk berpolitik dan ber-*theoria*.

Bila ilmu *poiesis* (teknis) menekankan kegunaan, dan cenderung tidak peduli dengan kebenaran teoretis atau soal yang berkaitan dengan integritas moral pelakunya, maka ilmu teoretis hanya peduli pada soal kebenaran – yang absolut dan universal – dan cenderung mengabaikan soal kegunaan dan integritas moral. Aristoteles menulis:

Dalam hubungannya dengan hal-hal paling tinggi di alam ini, kebijaksanaan (*sophia*) adalah pengetahuan ilmiah sekaligus inteligensi intuitif (*nous*). Itulah mengapa orang-orang mengatakan bahwa Anaxagoras dan Thales adalah orang bijak (*sophos*) namun tidak arif (*prudent, phronimos*) saat orang melihat bahwa mereka tampak tidak peduli dengan kepentingan mereka sendiri; sambil mengakui bahwa mereka memiliki pengetahuan yang jarang, luar biasa, sulit, atau bahkan adimanusiawi, mereka menyatakan bahwa pengetahuan mereka itu tak berguna karena orang-orang bijak ini tidak mencari tahu tentang hal-hal yang berguna bagi umat manusia.

Kearifan (*phronimos*), di lain pihak, berurusan dengan hal-hal manusiawi, dan berurusan dengan hal-hal yang bisa dijadikan objek deliberasi (musyawarah). Untuk bermusyawarah, kita menyatakan bahwa kehendak adalah fungsi paling khas dari manusia yang arif; namun tak seorang pun memusyawarahkan tentang sesuatu yang tak bisa berubah, juga bukan tentang sesuatu yang bisa berubah namun tidak menjadi sarana untuk tujuan tertentu, dan (yang dimaksud) tujuan adalah sebuah kebaikan yang bisa diraih oleh tindakan (manusiawi); dan seorang pemusyawarah yang baik umumnya adalah orang yang bisa menghitung untuk menemukan hal-hal terbaik yang bisa diraih oleh manusia (Aristotle, *The Nicomachean Ethics*, VI. vii.5-6).

Berbeda dengan ilmu *praxis* dan ilmu teknis yang objeknya adalah hal-hal yang sifatnya bisa berubah-ubah (kontingensi), objek kajian ilmu teoretis adalah hal-hal yang bersifat universal dan pasti benar. Ilmu teoretis mencari hal-hal akhir yang menjadi penyebab segala perubahan. Ia berniat mencari sebab niscaya di balik segala perubahan, sebuah *causa* yang bisa menjadi landasan kebenaran bagi segala sesuatunya. Ambisinya adalah mencari landasan mutlak segala sesuatu, sehingga untuk itu *tidak* diperlukan “pertimbangan” yang menjadi ciri dalam memilih sarana-sarana tindakan moral. Pertimbangan (dalam tindakan moral) diperlukan untuk memilih apa-apa yang “mungkin”. *Theoria* berambisi menemukan apa yang mutlak benar. Maka, dalam ilmu ini, modelnya adalah pembuktian. Dengan bukti-bukti, maka sebuah temuan dianggap sampai pada kesimpulan yang niscaya benar (Alfred Gomez-Muller, hlm. 34-35).

Ilmu teoretis mementingkan kebenaran, salah satunya lewat pembuktian silogistik. Misalnya, orang membuat silogisme sederhana memakai argumen teologis: a) nonmuslim adalah *kafir*, b) apa pun perbuatan orang *kafir* tidak halal, c) maka, kesimpulannya: apa pun yang dibuat nonmuslim tidak halal.

Demi kebenaran teoretis, maka orang yang dianggap kafir akan dinihilkan. Demi kebenaran teoretis, fakta bahwa banyak orang kafir justru membantu kemajuan ekonomi dan teknologi dianggap tidak relevan. Fakta bahwa banyak orang kafir dan ateis justru tidak korupsi, dianggap tidak relevan. Demi kebenaran teoretis, orang menjadi buta tuli terhadap realitas.

Sikap ideologis dan bahayanya

Orang yang menerapkan logika matematika (atau ilmu teoretis lainnya seperti teologi) ke ranah politik bisa disebut sebagai kaum *ideologis*, dalam arti orang yang berpikiran sempit dan picik. Manusia *teoretis* suka sekali dengan kebenaran, dan itu dihayati secara mutlak seperti $2+2$ pasti, harus selalu, di mana pun, hasilnya 4.

Manusia teoretis tidak peduli bahwa *de facto* si A bekerja transparan, *de facto* si A suka mengunjung orang yang *kesulitan* dan menyumbang dari uang pribadinya. Semua yang disebut integritas moral dibuang sebagai tidak benar karena si A tidak mengikuti ilmu teoretis (misalnya teologi/agama) yang benar. Sikap *teoretis* dekat dengan sikap ideologis. Ia tertutup pada pertimbangan akal sehat.

“

Dan sebaliknya juga benar, orang yang pandai berhitung tidak selalu dengan sendirinya bermoral baik! Banyak orang pintar justru melakukan plagiarisme, korupsi, atau bahkan menjadi ulama tanpa hati nurani! Banyak orang agamis, dengan pengetahuan teologi hebat, justru korup.

Persoalan $2+2=4$ adalah persoalan teoretis. Di depan rumusan matematis, soalnya hanyalah benar atau salah. Jika $2+2=4$ dianggap benar, maka rumusan lain, misalnya $2+2=5$, pastilah salah. Tidak mungkin ada kompromi atau jalan tengah di antara benar dan salah di situ.

Nah, apa yang di tataran teoretis tak terkompromikan, dalam tingkatan praksisnya *tidak berhubungan sama sekali* dengan mengapa seseorang lebih memilih $2+2=4$ *lebih baik* daripada $2+2=5$. Mungkin Anda justru merasa *lebih baik* “salah” dengan memilih $2+2=5$ daripada “benar” karena Anda punya maksud lain. Anda memilih $2+2=5$ supaya bisa menggoda atau membuat jengkel lawan bicara Anda. Bukankah itu sah-sah saja?

Pada tataran praksis hubungan antarmanusia, mengapa Anda memilih ini atau itu, kriterianya *bukan* lagi benar/salah, tetapi mana yang *lebih baik* atau *kurang baik* dilakukan. Dan politik tatarannya ada di *praxis* (*action*, tindakan).

Apa yang salah ($2+2=5$) bisa jadi kita pandang baik dalam konteks tertentu, misalnya karena untuk memberi rasa bangga pada anak yang sedang kita ajari, atau Anda sedang bercanda menggoda lawan bicara.

Lagipula, apa yang secara teoretis salah ($2+2=5$), tidak dengan sendirinya selalu buruk! Bila ada orang selalu salah menghitung (selalu berpikir $2+2=5$), apakah dengan demikian secara moral ia buruk dan layak digantung? Tentu tidak *kan*? Mengapa tidak boleh digantung? Ya karena soal $2+2=5$ sama sekali tidak berhubungan, atau tidak relevan, dengan kehidupan sehari-hari orang tersebut. Bisa jadi ia tetangga yang baik, murah hati, dan suka membantu. Hanya karena ia trisomik (mongoloid), jadi ia tidak bisa menghitung dengan tepat. Namun, itu bukan alasan untuk memenjarakannya!

Dan sebaliknya juga benar, orang yang pandai berhitung tidak selalu dengan sendirinya bermoral baik! Banyak orang pintar justru melakukan plagiarisme, korupsi, atau bahkan menjadi ulama tanpa hati nurani! Banyak orang agamis, dengan pengetahuan teologi hebat, justru korup.

Dalam soal pilpres, sikap ideologis gampang ditemukan di kalangan yang pro atau anti secara matematis. Kelompok pro-Jokowi akan membela habis-habisan Jokowi. Bagi mereka, Jokowi adalah kebenaran. Kaum pro-Jokowi akan meneror para pengkritik Jokowi sebagai orang-orang aneh, tak bermoral, bodoh, *neokadrun*. Dan demi membela Jokowi, mereka akan membuat ragam teori untuk membenarkan jun-

jungannya ini. Silogismenya sederhana: a) Jokowi adalah kebenaran, b) aku pendukung Jokowi, maka c) aku adalah kebenaran.

Sebaliknya, kelompok anti-Jokowi saat ini merayakan kebenaran mereka. Mereka yang dari dulu melihat Jokowi sebagai “kesalahan”, merasa terkonfirmasi. Mereka tertawa senang dengan kebenaran yang selama ini mereka pegang bahwa Jokowi adalah malapetaka bagi NKRI (utang yang banyak, menjadi budak Cina). Kini mereka meneror para pemuja Jokowi sebagai kaum picik, pemuja naif, bodoh, dan calon penghuni kerak neraka.

Kelicikan semua orang yang berposisi ideologis adalah mengaitkan kebenaran dengan kebaikan dan kesalahan dengan kejahatan! Kalau Anda pada tataran teori (agama/filsafat/ideologi) “benar”, maka Anda “baik”. Dengan demikian, semua orang lain yang tidak sepaham dengan Anda adalah “salah”, sehingga otomatis “jahat”! Hati-hati, di balik posisi ideologis selalu ada moral penuh teror. Ini seram, karena manusia riil dikorbankan demi teori-teori di kepala Anda sendiri.

“

Kelicikan semua orang yang berposisi ideologis adalah mengaitkan kebenaran dengan kebaikan dan kesalahan dengan kejahatan!

Soal politik adalah soal “apa yang hendak kita lakukan”, soal yang sifatnya praksis (*praxis*). Tidak ada sebuah kehendak yang selalu benar, dan kehendak lainnya sebagai murni salah. Yang ada hanyalah kehendak yang lebih atau kurang baik. Dan kelicikan kaum ideologis politik adalah menyulap masalah politik yang seharusnya dipandang seturut ukuran *lebih baik/buruk-kurang baik/buruk*, menjadi masalah *benar atau salah*. Turunan sikap ideologis ini adalah moralisme teroristik.

Sikap ideologis menekankan pentingnya kebenaran, dan tak peduli pada kegunaan atau integritas moral (misalnya dalam ketaatan pada konstitusi). Apa jadinya kalau kebenaran yang bersifat universal dan absolut diejawantahkan ke dalam kultus pada manusia? Aneh, manusia *kok* dianggap kebenaran universal! Manusia itu *ésuk delé, soré témpé*, pagi kedelai, sore menjadi tempe. Manusia itu selalu berubah. Maka, sangat tidak logis bahwa manusia dikultuskan jadi kebenaran. Selain *nggak* masuk di akal, apa jadinya kalau hidup bersama dipenuhi sumpah serapah dan teror atas nama tafsir kebenaran tentang seorang manusia yang *de facto* hanya di kepala Anda sendiri? *Polis/negara*, hidup bersama, akan *runtkad entèk-entèkan*, jebol tercerabut semua.

Ranah ilmu *praxis*

Ranah *praxis* adalah wilayah tindakan manusiawi, di mana tujuannya melekat di dalam tindakannya itu sendiri. Muncul dari kehendak si pelaku, objek *praxis* (*action*, tindakan manusiawi) adalah sesama manusia, bukan benda mati, bukan pula teori di kepala. Maka, kehendak ini tidak bisa dipisahkan dari tindakan itu sendiri. Saat orang bertindak baik, tujuan dari tindakan itu ditemukan dalam tindakan itu sendiri. Saat seseorang berbuat baik, biasanya ia melakukannya tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Kepuasan ia dapatkan dari tindakan baik itu sendiri, bukan dari apakah tindakan baik itu menghasilkan sesuatu atau tidak. Tindakan ini sangat berbeda dengan kegiatan produktif seorang tukang masak. Saat memasak, tentu kenikmatan didapatkan si tukang masak bukan dalam kegiatan memasak itu sendiri, melainkan saat hasil masakannya dikatakan enak dan habis dimakan.

Praxis (*action*) adalah kegiatan-kegiatan di mana manusia mengejawantahkan dirinya sebagai manusia. Maka, secara esensial, *praxis* sangat berkaitan dengan etika. Mengapa? Karena bagi Aristoteles, esensi manusia adalah mewujudkan kodratnya secara optimal untuk

mencapai *arete/virtue*. Dalam segala pilihan, manusia bertindak memilih mencari apa yang menurutnya paling cocok dengan kebaikan.

Tindakan manusia (*praxis*) berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan akhirnya sebagai manusia – yaitu kebaikan. Bagi Aristoteles, tidak ada satu ukuran kebaikan. Tidak ada idea tentang kebaikan yang satu dan sama bagi semua orang. Kebaikan itu intrinsik bersifat heterogen. Menurut substansi, kebaikan adalah Tuhan atau Intelek; menurut kualitasnya, kebaikan adalah keutamaan (optimalnya sesuatu); menurut kuantitasnya, kebaikan adalah sebuah jalan tengah. Bagi Aristoteles, kebaikan adalah sebuah istilah homonimik (bdk. *Ethique à Nicomaque/EN*, IV, vi.2-3). Pun kalau Aristoteles berbicara tentang “kebaikan dalam dirinya sendiri”, ia mengatakan bahwa hal itu tidak akan bisa dikenali dan diketahui oleh manusia (bdk. *EN* I 4 1097 a 1-10). Kebaikan dalam dirinya sendiri adalah “prinsip dan tujuan tertinggi” yang hendak diraih lewat *praxis* hidup bermoral. Namun, dalam ranah tindakan manusiawi “kebaikan dalam dirinya sendiri” hanya menjadi prinsip *pengarah*, yaitu ke arah mana manusia mesti mengorientasikan dirinya, dan bukan prinsip dalam arti menjadi “titik awal” untuk mulai bertindak! Oleh sebab itu, bagi Aristoteles, “mengetahui apa itu kebaikan dalam dirinya sendiri” bukanlah yang paling utama untuk mulai mempraktikkan hidup bermoral guna memperjuangkan kebahagiaannya (bdk. Monique Canto-Sperber, *Philosophie grecque*, Paris: PUF, 1998 (edisi pertama 1997), hl. 418-419).

Dalam arti ini, *praxis* lebih tinggi daripada kegiatan produksi (*tekne*). Meski begitu, sebagaimana *tekne* mementingkan pilihan-pilihan sarana, maka *praxis* pun mesti bisa memilih sarana mana yang perlu dipakai agar tujuan akhir manusia bisa tercapai. Artinya, *praxis* harus dibimbing oleh keutamaan, yaitu pilihan-pilihan yang bermoral. Visi umum *praxis* adalah sesuatu yang universal, yaitu manusia mencapai kebaikan. Akan tetapi, visi ini ditampakkan lewat pilihan-pilihan yang *partikular dan berubah-ubah* (Alfred Gomez-Muller, hlm. 31).

Itu makanya, *praxis* membutuhkan proses deliberasi: proses menimbang dan memilih sarana-sarana yang secara manusiawi bisa diambil. Misalnya, untuk berbuat baik, setiap orang bisa membagi-bagikan uangnya. Namun, hanya orang yang bijaksana yang bisa membagikan uang dengan tepat, yakni kapan, berapa,

untuk apa, dan dengan cara apa uang itu dibagi demi sebuah kebaikan rasional. Di sini, antara prinsip tindakan dengan cara penerapan konkretnya, tak bisa dipisahkan.

Bagi Aristoteles, politik dan etika adalah ilmu *praxis*, ilmu tindakan, *action*. Sebagai ilmu *praxis*, tidak ada kebenaran atau kesalahan mutlak di situ. Memilih ini, atau itu, atau bahkan dua-duanya, merupakan pilihan-pilihan yang harus diambil bukan demi “sebuah kebenaran”. Soal “kebenaran” dalam pilihan ditentukan oleh *desire* yang ada di dalam diri si A sendiri. A harus memilih dengan pertimbangan rasional dan sesuai dengan *habitus* yang selama ini sudah ia bangun. Bisa jadi ia memilih “kesalahan” (misalnya $2+2=5$) karena menurutnya pilihan itu baik untuk ia lakukan. Pilihan tindakan (*praxis*) juga dilakukan bukan “demi sebuah hasil/kegunaan”. Berbeda dengan etika utilitaris yang bertumpu pada kegunaan, etika Aristoteles menekankan sisi karakter pelaku tindakan. Bisa jadi orang tetap *keukeuh* bertindak baik, meski ia tidak melihat hasil atau kegunaannya. Mengapa? Karena ia puas dalam bertindak baik itu sendiri.

Dalam *praxis*, kebenarannya tidak pernah hitam-putih, bersifat absolut, dan universal, dan kegunaannya juga tidak pernah jelas. Bila saya punya dua anak, dan saya memiliki uang 100 ribu, bagaimana saya harus membaginya? Semua orang dengan akal sehat menjawab: “tergantung situasi”. Kalau dua anak itu kembar identik, sama-sama sekolah di SMA, tentu wajar masing-masing diberi 50 ribu. Tetapi kalau yang satu sedang berkuliah, sementara satunya masih di TK, tentu sah juga kalau saya membaginya 80 ribu dan 20 ribu. Semua orang tahu bahwa tidak ada kebenaran absolut dan universal di situ. Tiap orang harus menyesuaikan diri dengan situasinya yang berbeda-beda. Kegunaannya apa? Mengapa saya bersusah payah berusaha menjadi bapak yang adil? Mengapa untuk membagi uang saya harus menimbang situasi-situasi? Demi apa saya ingin menjadi orang adil, mengapa saya ingin menjadi orang baik? Di titik ini kita paham bahwa kegunaan sebuah tindakan etis tidak pernah jelas. Kegunaan ditemukan dalam rasa puas melakukan tindakan baik itu sendiri. Dan kita sadar bahwa ini sangat relatif, kontingensi, tergantung dari masing-masing.

Maka, dalam soal *copras-capres*, kita bisa menilai seorang politikus seperti kita menilai seorang pemain bola. Pemain yang menarik akan bermain bola dengan

penuh hasrat dan cantik, tanpa peduli bagaimana hasil akhirnya. Dan ini tidak mudah. Ia harus berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit. Namun kita percaya, pemain bola yang sejati akan bermain dengan indah.

Sikap etis

Bagaimana menilai Jokowi? Benarkah ia sedang menjalankan politik dinasti? Mari kita singkirkan soal benar salah. Kita lihat bahwa selama 9 tahun Jokowi bekerja luar biasa membangun negeri ini. Maka, normal bahwa Jokowi ingin supaya legasinya berlanjut. Untuk itu, Jokowi melakukan pilihan-pilihan politik. Saat ia mendukung Ganjar, tak ada yang protes. Saat ia mendukung Prabowo, tak ada yang marah. Namun, saat Gibran menjadi cawapres lewat ingar bingar MK, di situ akal sehat banyak orang mencium sesuatu yang aneh. Sah-sah saja Jokowi ingin legasinya berlanjut demi pembangunan Indonesia, tetapi apakah caranya etis? Apakah konstitusi bisa diterabas begitu saja?

Soal Gibran merupakan titik kulminasi dari begitu banyak rumor di belakangnya: pertarungan emak Banteng *versus* istri Jokowi yang katanya tidak rela selama 9 tahun suaminya diremehkan sekadar sebagai petugas partai (sedemikian jengkel sehingga sang istri sampai mengunci kamar semalam-malaman di istana Bogor sehingga Presiden harus tidur di sofa), pertarungan emak Banteng *versus* Jokowi yang ingin 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, “pengkhianatan” Jokowi kepada PDIP yang selama ini membesarkannya (padahal kurang baik apa Mega kepada Jokowi sejak Mega memberi privilese supaya Gibran bisa menjadi calon Wali Kota Solo), keterlibatan Menteri Sekretaris Negara memuluskan langkah Gibran, pemanggilan para Ketua Parpol Koalisi Indonesia Maju yang disandera Jokowi dengan isu korupsi (sehingga mau tak mau harus mendukung Gibran sebagai cawapres), dan seterusnya. Semua itu hanya rumor yang sangat sulit diverifikasi. Kebanyakan dari kita hanya mendengarkan “katanya si ini, katanya si anu” tanpa pernah memverifikasinya sendiri.

Namun, kalau hendak berpegang pada sesuatu yang kasat mata, keputusan MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) pada hari Senin, tanggal 7 November 2023, yang mengatakan bahwa “terjadi pelanggaran berat”⁹ dalam proses sidang MK soal batas usia capres/cawapres sehingga Anwar Usman (paman Gibran) dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK,

adalah bukti bahwa cara mengegolkan Gibran menjadi cawapres tidak etis¹⁰.

Aristoteles menekankan pentingnya hukum sebagai penjaga gawang hidup bersama, di mana tiap warga negara bisa mengejar kebahagiaannya secara etis. Dalam konteks zaman kita, hukum yang menjadi aturan main adalah hukum demokratis yang rohnya adalah kesetaraan. Dalam *praxis*, inilah nilai yang seharusnya dibela dan dikultuskan. Nilai kesetaraan bersifat abadi. Berbeda dengan manusia yang pintar balas budi memberi uang, sang nilai kesetaraan tak bisa menyogok para pendukungnya. Maka, menjunjung tinggi nilai demokrasi – yang menjadi kesepakatan bersama rakyat Indonesia sejak 1998 – yang kebenarannya tak pernah ajek karena tiap periode harus diperjelas dan diperjuangkan, dan kegunaannya tak pernah jelas karena sebagai pendukung kesetaraan kita tak pernah mendapat jabatan atau uang, merupakan sikap paling tepat untuk menjaga NKRI. *Copras-capres* hanya lima tahun sekali, tetapi nilai demokrasi jauh lebih penting untuk dibela, karena bila hilang, pemilu juga tak bermakna.

Sekali lagi, meski tujuan meloloskan Gibran sebagai cawapres mungkin baik untuk melanjutkan legasi, namun, bila pilihan konkretnya menabrak hukum, tentu ini tidak baik. Hukum adalah landasan hidup bersama. Jika hukum dilemahkan oleh dia yang seharusnya menegakkannya, maka bahaya sedang mengancam apa yang selama ini menjadi penopang hidup bersama.

Bagi Aristoteles, kajian tentang moral (etika) ditundukkan pada politik dalam arti bahwa hidup di bawah undang-undang yang baik adalah cara terbaik untuk mengakarkan tiap warga negara dalam hidup berkeutamaan. Artinya, Aristoteles memberi tempat luhur kepada hukum. Hukum adalah manifestasi kebaikan tertinggi dalam sebuah hidup bersama (bdk uraian panjang di *EN* 1094 a 24– b 10)! Hukum, sebagai pengejawantahan kebaikan, diyakini akan membantu warga negara yang taat untuk menjadi baik. Maka, sangat ironis bila orang yang seharusnya menegakkan hukum, justru ia sendiri yang mengobok-oboknya. Tindakan ini menunjukkan bahwa si pelaku tidak etis, dan berbahaya bagi hidup bersama (Monique Canto-Sperber, *Philosophie grecque*, hlm. 105).

Orang tentu tetap bisa berpegang secara pragmatis bahwa “yang penting tujuannya baik”. Seperti pengusaha/pedagang, yang penting untung! Perkara caranya legal atau tidak, yang penting *cuan*, yang penting menang.

Tetapi, apakah soal etika bisa dibuang begitu saja ke tong sampah? Ini adalah cemar yang sulit dihilangkan. Mungkin orang tetap salut pada Anda karena hasilnya selalu ada, dan Anda selalu menang. Tetapi, bukankah sikap pragmatis seperti itu membuka kedok karakter Anda sebagai pedagang yang, demi keuntungan, menisbikan moralitas dalam segala hal? Padahal, Aristoteles tegas mengingatkan bahwa tidak mungkin orang berbahagia bila pilihan-pilihannya tak bermoral: “manusia mencapai kebajikannya (artinya bahagia) apabila jiwanya berfungsi secara optimal” (*arete*, berkeutamaan, bdk. *NE*, buku I, vii. 15-16).

Orang juga bisa bersikap ideologis dengan menutup mata dan telinga seolah Jokowi adalah kebenaran ultima. Maju tak gentar membela yang *dianggap* benar. Namun, kalau pertimbangan etis dikesampingkan, fakta putusan MKMK dianggap tidak ada, lalu Anda ini hidup di mana? Di *bubble* Anda sendiri? Bila Anda *keukeuh* dengan kebenaran di kepala Anda sendiri, jangan-jangan yang Anda pegang itu ekor cecak yang sudah ditanggalkan karena si cecak telah menumbuhkan ekor baru. Selain ilusif dan mengesampingkan etika, sikap ideologis tidak membuat hidup bersama lebih beradab.

“

Sangat tidak mungkin sebenarnya bersikap ideologis dalam sebuah situasi yang sangat cair. Jangan-jangan, sikap ideologis ini hanya cermin untuk kecenderungan kita yang feodal.

Neofeodalisme

Bersikap ideologis dalam dunia perpolitikan di Indonesia sangatlah aneh. Mengapa? Karena di Indonesia tidak ada ideologi kanan-kiri seperti di luar negeri. Saat kampanye, semua parpol mengatakan bahwa mereka ingin menyejahterakan rakyat. Kadang kita bingung, kalau semua programnya sama, mengapa membuat parpol yang berbeda-beda? Itu makanya, orang sering mengatakan bahwa politik di Indonesia itu cair dan dinamis. Praktik para politikus yang suka gonta-ganti parpol adalah hal yang lumrah. Apa yang dilakukan Jokowi dan anaknya, yang sementara ini masih mengaku kader PDIP tetapi *de facto* mendukung Prabowo dan menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju, hanyalah satu bukti tambahan bahwa politik di Indonesia memang sangat cair.

Sangat tidak mungkin sebenarnya bersikap ideologis dalam sebuah situasi yang sangat cair. Jangan-jangan, sikap ideologis ini hanya cermin untuk kecenderungan kita yang feodal. Pertama, tentu mula-mula harus dimaklumi bahwa soal dinasti bukanlah kekhasan Jokowi. Semua orang kuat di negeri ini melakukan hal yang sama, yaitu memberi privilese kepada keluarga atau saudara-saudaranya. Tak ada yang aneh di sini. Prabowo pun mengakui itu.¹⁴ Kedua, orang yang berjiwa feodal cenderung mengabaikan prinsip bertindak “*pener* (tepat) *lan bener* (benar)”. Meski secara etis proses persidangan MK adalah pelanggaran berat, artinya *tidak bener*, orang-orang berjiwa feodal tetap menganggap cawapres Gibran adalah sesuatu yang *pener* (tepat). Seorang feodal memaksakan bahwa selernya yang *pener* adalah kebenaran itu sendiri.

Feodalisme adalah penyakit kronis kita semua. Apa buktinya? Semua parpol besar di Koalisi Indonesia Maju meng-iya-i pencawapresan Gibran. Bahkan, setelah MKMK menyatakan ada “pelanggaran berat”, tak ada satu parpol pun yang menyuarakan pendapatnya untuk mendukung MKMK. Mengherankan! Lebih miris lagi, pada awal November ini, banyak survei mengatakan bahwa pencawapresan Gibran justru menaikkan elektabilitas Prabowo-Gibran! Ini hanya menegaskan bahwa rakyat Indonesia memang berjiwa feodal. Pentingnya menjaga konstitusi dan nilai-nilai etis dalam berdemokrasi (kesetaraan) tampaknya belum disadari.

Kita tengok kanan dan kiri kita. Keluarga mana yang tidak akan mencari privilese supaya anak dan saudaranya bisa sukses? Bila ada peluang, siapa yang

tidak akan mendahulukan keluarganya? Feodalisme dalam wujud politik dinasti atau relasi *patron-client* masih menjadi aturan main dalam proses rekrutmen PNS, pegawai pemda, anggota TNI dan Polri, bahkan juga dalam perusahaan-perusahaan swasta. Guyonan umum di Indonesia: orang rajin dan berprestasi kalah dari penjilat, tapi penjilat kalah dari “orang dalam”. Dalam arti ini, Jokowi memang *hanya* kita. Ia adalah cermin diri kita semua. Siapa yang mendengar para calon berkontestasi soal program? Semua ributnya soal “siapa *nenteng* siapa”.

Saat beberapa tokoh nasional, seperti Gus Mus dan Goenawan Mohamad, menyatakan keprihatinan tentang kondisi demokrasi kita di *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, 12 November 2023, beberapa netizen dengan entengnya berkomentar, “Wah, sudah cair, caiiir, duitnya sudah turun.” Komentar barbar ini sungguh memprihatinkan.

Harapan?

Kata politik berasal dari bahasa Yunani *polis* (kota/negara). Secara historis, kata *polis* yang diasosiasikan dengan peradaban (sivilisasi) merupakan kebalikan dari desa yang merujuk pada orang yang hidup di alam yang kasar atau kaum barbar (merujuk pada orang non-Yunani yang dianggap tak beradab/berbudaya). Berpolitik, hidup dalam *polis*, dalam arti harfiahnya adalah hidup beradab (Francis Wolff, *Aristote et Politique*, Paris : PUF, 1991, hlm. 6-7). Bila kita punya adab, mari kita jaga peradaban demokrasi kita yang baru berusia 25 tahun dengan memilih capres yang berkarakter demokrat. Jangan pilih neo-Orde Baru dan neofeodal.

Catatan Akhir

1. PSI (dengan perkara nomor 29/PUU-XXI/2023) menggugat pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.
2. MK mengabulkan sebagian gugatan perkara No 90/PUU – XXI/2023 terkait usia capres-cawapres yang dimohonkan oleh seorang mahasiswa Surakarta, Almas Tsaqibbirru (anak dari ketua Masyarakat Anti Korupsi/MAKI Boyamin Saiman). Putusan ini berlaku untuk Pilpres 2024. MK menyebut mahasiswa ini dari Universitas Negeri Surakarta, padahal UNSA (Universitas Surakarta) bukanlah kampus negeri, melainkan swasta.
3. Berita bisa ditemukan di Kamis, 26 Oktober 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231026062603-32-1016046/adian-megawati-tolak-permintaan-jokowi-presiden-tiga-periode>

Putusan MKMK pada tanggal 7 November, serta suara dari beberapa tokoh bangsa, menjadi harapan bahwa bangsa ini masih cinta pada nilai-nilai demokrasi. Bila nanti ada sengketa pilpres, paling tidak kita masih bisa percaya pada MK yang menjadi wasit akhir.

Melihat tendensi pada bulan Oktober dan November 2023, mungkin neofeodalisme dan neo-Orba di bawah orkestrasi Jokowi akan menang. Para pengusaha menyukai rezim pedagang yang abai pada nilai-nilai, karena yang penting semua senang kebagian *cuan*. Dan sejauh kondisi ekonomi kita baik-baik saja, maka tidak akan ada perubahan apa-apa. Rakyat merasa nyaman dengan hasil pencapaian Jokowi selama 9 tahun terakhir: infrastruktur, BPJS, BOS di sekolah, dan sebentar lagi BLT yang akan dibagi-bagi ke rakyat. Rakyat puas dan tenang. Rakyat sampai lupa bahwa yang akan dipilih nanti bukan Jokowi, tapi orang lain. Itu makanya rakyat harus waspada. ●

A. Setyo Wibowo,
dosen STF Driyarkara, Jakarta

Red. Naskah ini pernah diberikan sebagai Kuliah Umum untuk Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, berjudul “Menerawang Kebenaran dalam Politik menurut Aristoteles”, tanggal 20 Oktober 2023, via Zoom, pukul 13.00 -14.30. Untuk Basis, naskah tersebut dikoreksi, ditulis ulang dan dilengkapi lagi argumennya.

4. Berita bisa ditemukan di *Kompas*, Kamis 26 Oktober 2023 (<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/26/093000465/beda-puan-dan-adian-soal-permintaan-masa-jabatan-presiden-3-periode?page=all>)
5. Sabtu, 28 Oktober 2023, <https://medan.tribunnews.com/2023/10/28/hasto-membenarkan-soal-permintaan-presiden-jokowi-3-periode-info-didapat-dari-seorang-menteri>
6. Ada banyak teori tentang kebenaran: a) korespondensi (kesesuaian fakta dan pikiran), b) koherensi (keutuhan argumentasi pikiran), c) pragmatis (kegunaan langsung), d) performatif, dan e) kebenaran sebagai *aletheia*.
7. Keterangan pers Presiden Jokowi pada malam hari tgl 16 Oktober 2023, terkait Putusan MK (dari *youtube* Sekretariat Presiden: “Mengenai keputusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif”. Pendapat Jokowi mengenai kemungkinan Gibran menjadi cawapres: “Pasangan Capres dan Cawapres itu ditentukan oleh parpol atau gabungan parpol, jadi silahkan tanyakan saja ke parpol, itu wilayah parpol, dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres”.
8. <https://wartakota.tribunnews.com/2023/11/08/setelah-gibran-jokowi-ingin-jadikan-kaesang-gubernur-dki-jakarta-pengamat-pas-masih-memerintah>
9. Bdk. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>. “Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasil, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.” Demikian dikatakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dengan didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih, dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Selasa (7/11/2023).” Bdk. Restu Wahyuning Asih, “Pelanggaran Berat, Anwar Usman Dipecat Jadi Ketua MK”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20231107/16/1712093/pelanggaran-berat-anwar-usman-dipecat-jadi-ketua-mk>: “Amar putusan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian jabatan dari Ketua Mahkamah Konstitusi”.
10. Putusan MK ini masih berbuntut panjang. Artikel *Kompas* Rabu, 15 November 2023, hl. 15, “Problem Serious Bisa Muncul” menginformasikan bahwa putusan MKMK tentang adanya “cacat formil” dalam proses pengambilan putusan MK no 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres membuat putusan itu seharusnya ditinjau ulang. Tanggal 14 November 2023, MK telah menerima 8 permohonan pengujian ulang. Kapan gugatan-gugatan pengujian ulang ini akan disidangkan?
11. Tanggal 23 Oktober 2023, dalam sebuah wawancara merespon isu dinasti dari rencana pencawapresan Gibran, Prabowo menyatakan : « Oh, Dinasti. Semua dinasti bung. Semua dinasti, ya kan. » Prabowo meminta supaya hal itu tidak dipersoalkan, dan dilihat sisi positifnya saja. Bdk. <https://news.detik.com/pemilu/d-6997912/prabowo-kita-semua-dinasti-bung-dinasti-merah-putih>